**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Literatur Review**

Kajian literatur merupakan ringkasan yang berasal dari penelitian lain seperti suatu jurnal, buku, atau dokumen lainnya yang menjelaskan keadaan masa lalu dan saat ini mengenai informasi suatu topik penelitian yang sedang dilakukan.

Berdasarkan skripsi Cindy Paramitha Tobing yang berjudul “***Hubungan Luar Negeri Indonesia-Arab Saudi Dalam Konteks Tenaga Kerja Indonesia***” di dalamnya terdapat pemaparan tentang kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi dibidang ekonomi dan perdagangan yang menjelaskan bahwa nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi meningkat secara signifikan dari US$ 672,07 juta di tahun 2006 menjadi US$ 944,24 juta di tahun 2007, dan mencapai US$ 1,19 miliar di tahun 2008. Namn demikian, karena krisis ekonomi global pada tahun 2009, ekspor Indonesia ke Arab Saudi menurun hingga US$ 956 juta. Pada periode Januari hingga Desember 2012, total perdagangan Indonesia ke Arab Saudi mencapai US$ 6,97 miliar atau naik 1,74% dibanding tahun 2011. Pada tahun 2012, ekspor Indonesia ke Arab Saudi mencapai US$ 1,7 miliar, sedangkan impor Indonesia dari Arab Saudi sebesar US$ 5,1 miliar, sehingga Indonesia mengalami defisit US$ 3,4 miliar. Perdagangan Indonesia dengan Arab Saudi memang belum berimbang, karena impor migas Indonesia yang jauh lebih besar dari kemampuan ekspor Indonesia. Namun pada tahun 2012 impor migas Indonesia turun -7,21% dari US$4,47 miliar pada tahun 2011, menjadi US$4,15 miliar pada tahun 2012. Diluar komoditi migas, neraca perdagangan Indonesia dengan Arab Saudi terlihat cukup baik. Ekspor non migas Indonesia ke Arab Saudi pada tahun 2012 tercatat US$ 1,77 miliar, atau naik 24,01 % dibandingkan tahun 2011. Sedangkan ekspor Arab Saudi ke Indonesia tercatat US$ 1,04 miliar, sehingga Indonesia mengalami surplus US$ 728,2 juta.

Dari pemaparan skripsi Cindy Paramitha Tobing dapat disimpulkan alasan Indonesia menekan kerjasama perdagangan dengan Arab Saudi dibidang otomotif, karena diluar non migas Indonesia mendapatkan surplus untuk menutupi defisit yang terjadi akibat berlebihnya impor migas dari Arab Saudi sehingga Indonesia menekan untuk meningkatkan ekspor komoditas bernilai lebih. Indonesia memprioritaskan ekspor komoditas bernilai lebih terutama bidang otomotif, yaitu mobil, karena Indonesia mampu menciptakan mobil yang sesuai dengan keadaan dan minat penduduk di Arab Saudi serta Arab Saudi pun menyukai mobil buatan Indonesia sehingga Arab Saudi terus melakukan impor mobil dari Indonesia.

Dalam skripsi Ari Wigiantari yang berjudul “***Kerjasama Indonesia-Jepang Pada Industri Otomotif Mobil Jepang di Indonesia Melalui Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)***” menjelaskan tentang sejauh mana kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Jepang pada industri otomotif mobil jepang di Indonesia melalui *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. Jepang merupakan mitra terpenting Indonesia dalam hubungan ekonomi. Selain sebagai negara donor utama dan mitra dagang, Jepang pun merupakan investor terbesar dalam penanaman modal asing (PMA) di Indonesia. Konsentrasi PMA Jepang adalah dibidang industri manufaktur. Hubungan kerjasama dibidang ekonomi antara Jepang dan Indonesia telah terjalin lebih dari setengah abad. Selama itu pula, Jepang telah turut berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Peran Jepang dalam perekonomian Indonesia dapat ditinjau dari tiga aspek, meliputi sektor perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi. Jepang dan Indonesia telah menjalin hubungan ekonomi yang erat dalam berbagai bidang. Dibidang perdagangan barang, Jepang adalah mitra dagang terbesar dalam ekspor dan impor untuk Indonesia sebelum krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia merupakan lokasi investasi yang cukup menarik bagi investor Jepang. Indonesia menduduki urutan ketiga di dunia. Setelah krisis, posisi Indonesia turun satu peringkat hingga tahun 2002. Namun, setelah itu terus menerus merosot ke urutan sembilan pada tahun 2006. Pada tahun 2007 sampai dengan 2008, posisi Indonesia membaik satu peringkat ke urutan delapan.

Dari pemaparan skripsi Ari Wigiantari, terdapat persamaan pembahasan dengan peneliti yaitu tentang kerjasama bilateral dibidang otomotif yang dilakukan oleh Indonesia. Persamaan lainnya juga terdapat penjelasan penurunan atau kemerosotan kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara, akan tetapi terdapat perbedaan di dalam pembahasan peniliti. Perbedaan antara skripsi Ari Wigiantari dengan peneliti yaitu, peneliti akan membahas kerjasama bilateral dibidang otomotif dengan Kerajaan Arab Saudi, selain itu perbedaan lainnya adalah jika kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Jepang adalah Indonesia melakukan impor dibidang industri dari Jepang, tetapi peneliti akan membahas kerjasama ekspor mobil Indonesia ke Arab Saudi yang dimana Indonesia memiliki kesempatan atau peluang untuk meningkatkan pasar ekspor ke Arab Saudi karena pembaharuan kerjasama di tahun 2017 yang merujuk dari tahun 1981, yang artinya Indonesia dengan Arab Saudi sedang melakukan perbaikan kerjasama yang sebelumnya sempat merosot akibat menurunya harga minyak.

Berdasarkan jurnal Nevlita Sianturi yang berjudul “***Pengaruh Saudi Vision 2030 Dan Agenda Foreign Direct Invesment (FDI) Arab Saudi Di Indonesia***” memaparkan bahwa penelitiannya mengangkat kerjsama bilateral antara Arab Saudi dengan Indonesia dibidang ekonomi. Saudi Vision ini menjelaskan tentang bagaimana reformasi ekonomi Arab Saudi berpengaruh dengan hubungan kerjasama investasi Arab Saudi-Indonesia. Hubungan diplomatik Arab Saudi dan Indonesia telah lama terbina dalam kurun waktu yang cukup lama dan telah banyak menghasilkan banyak bentuk kerjasama yang telah disepakati, hal ini tentu saja tidak terlepas dari latar belakang Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi Indonesia bukanlah negara Islam. Hubungan kerjasama Indonesia-Arab Saudi terbilang masih cukup minim, namun dalam reformasi perekonomian Arab Saudi yaitu Saudi Vision 2030 tersebut juga melibatkan Indonesia sebagai negara tujuan investasi, peluang besar telah ditawarkan Arab Saudi ke Indonesia. Telah berjalan pembangunan Kilang cilacap dengan besar investasi yang ditanamkan Arab Saudi senilai US$ 6 miliar dan kemudian telah ditandatangani 11 MoU (*Memorandum of Understanding*) antar kedua negara. Ada tiga aspek penting yang menjadi tujuan daripada kunjungan Raja Salman ke Indonesia, yakni aspek ekonomi, hal ini tentu terkait dengan perdagangan dan investasi Arab Saudi ke Indonesia, maupun Indonesia ke Arab Saudi. Aspek ekonomi merupakan aspek terpenting yang menempati porsi paling besar dalam kunjungan tersebut. Hal itu dikarenakan janji investasi yang cukup besar yang hendak dilakukan Arab Saudi. Oleh karena itu Raja Salman menawarkan 25 miliar dolar AS untuk diinvestasikan di Indonesia. Investasi sebesar itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur kilang minyak Cilacap, Dumai, dan Balongan, serta pembangunan perumahan murah dan pariwisata. Dinamika perekonomian dunia kini sudah bergeser dari Barat ke Timur, yaitu orientasi pada modal sumber daya manusia, hal ini ditunjukkan dengan kunjungan Raja Salman ke Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan 11 MoU (*Memorandum of Understanding*). Penandatanganan 11 MoU ini merupakan komitmen jangka panjang kedua negara untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, dan budaya.

Dari pemaparan tersebut terdapat pembahasan yang sama dengan peneliti, yaitu membahas kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi dibidang perdagangan antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan dan Investasi Kerajaan Arab Saudi. Perbedaan dari jurnal Nevlita Sianturi dengan peneliti adalah penekanan kerjasamanya, jika Nevlita Sianturi membahas tentang reformasi ekonomi Arab Saudi, yang memfokuskan untuk berinvestasi di Indonesia, sedangkan peneliti akan fokus pada hubungan kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Arab Saudi yang terdapat di salah satu MoU (*Memorandum of Understanding*), yaitu Program Kerjasama Perdagangan antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Kementerian Perdagangan dan Investasi Kerajaan Arab Saudi.

1. **Kerangka Teoritis/Konseptual**

Untuk mempermudah proses penelitian ini diperlukan adanya landasan berpijak untuk memperkuat analisa. Sebelum mengemukakan konsep-konsep yang akan membahas pokok-pokok pikran yang sesuai dengan tema penelitian ini adalah suatu keharusan di dalam suatu penelitian untuk menggunakan pendekatan ilmiah kerangka pemikiran konseptual dalam mengarahkan penelitian yang dimaksud.

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan dengan ditopang oleh pendapat para pakar yang berkompeten dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana dalam membentuk pengertian dan menjadikannya pedoman dalam objek penelitian. Untuk dapat menjawab permasalahan yang ada maka digunakan teori kerjasama internasional dan teori perdagangan internasional. Mengawali pemaparan dalam kerangka teoritis ini, terlebih dahulu perlu dipahami tentang definisi dari hubungan internasional itu sendiri.

1. **Hubungan Internasional**

Adanya hubungan antar bangsa sudah lama terjadi dan hubungan tersebut berlangsung dalam suatu masyarakat yang disebut dengan masyarakat antar bangsa. Hubungan yang semula dalam bentuk primitif kemudian berkembang ke dalam bentuk yang lebih *modern*. Hubungan tersebut terjadi karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan oranglain.

Begitu juga dengan sebuah negara, negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintah yang mengatur ekonomi, poitik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. Untuk memenuhi semua kebutuhan suatu negara tidak mungkin dapat dilakukan dengan sendirinya, maka dari itu negara tersebut membutuhkan negara lainnya sehingga tercipta suatu hubungan internasional.

Istilah hubungan internasional diciptakan pertama kali oleh Jeremy Bantham. Jeremy Bantham adalah salah seorang yang mempunyai minat yang besar terhadap hubungan antar negara yang tumbuh semakin populer pada saat itu. Sebagai suatu ilmu, hubungan internasional merupakan satu-kesatuan disiplin, dan memiliki ruang lingkup serta kosep-konsep dasar (Soeprapto, 1997: 12).

Dalam bukunya yang berjudul *Hubungan Internasional Sistem, Interaksi, dan Perilaku*, Soeprapto mengatakan terdapat dua sebab yang mendorong lahirnya Ilmu Hubungan Internasional. Kedua sebab tersebut adalah:

1. Adanya minat yang besar terhadap fenomena yang ada setelah Perang Dunia I selesai. Fenomena tersebut banyak menarik perhatian mereka.
2. Perang Dunia I telah banyak menelan korban manusia serta kerusakan-kerusakan materil. Melihat akibat dari Perang Dunia I tersebut, lalu timbul kesadaran betapa pentingnya kebutuhan untuk mencegah peperangan dan terselenggaranya ketertiban dunia (Soeprapto, 1997: 12).

Hubungan internasional pada mulanya berasal dari kontak dan interaksi diantara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman isu-isu internasional mengalami perkembangan, negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu internasional diluar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan. Dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional, sehingga interdepedensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita dan Yani, 2005: 3-4).

Pergaulan internasional yang sudah tidak lagi mengenal batas, membawa pengaruh yang signifikan bagi setiap negara. Pergaulan internasional dalam konteks Hubungan Internasional meliputi beberapa segi hubungan. Dalam hal ini K. J. Holsti memberi deskripsi tentang pengertian Hubungan Internsional seperti dibawah ini:

“**Hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi lemabaga perdagangan internasional, dan perkembangan nilai dan etika internasional.**”**[[1]](#footnote-1)**

 Menurut J.C. Johari, hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat, disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (*non state actors*) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara. Pemikiran Hubungan Internasional dipengaruhi oleh subjek-subjek akademik lainnya seperti, filsafat, sejarah, hukum, sosiologi, dan/atau ekonomi. Pemikiran hubungan internasional juga menjawab perkembangan historis dan kontemporer dalam dunia nyata. Ada 3 perdebatan besar sejak hubungan internasional menjadi subjek akademik diakhir perang dunia pertama, dan sekarang kami berada diawal tahap keempat. Perdebatan besar yang pertama adalah antara liberalisme utopia dan realisme, yang kedua antara pendekatan tradisional dan berhavioralisme, yang ketiga antara neorealisme/neoliberalisme dan neomarxisme. Perdebatan keempat yang muncul adalah antara tradisi yang telah mapan dan alternatif-alternatif kaum pasca positivisme (Jackson&Sorensen, 1998: 45-46).

Menurut Anak Agung Bantu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam transisi, hal itu berdampak pada situasi hubungan internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebgainya. Selain itu, hubungan internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam hubungan internasional (Perwita dan Yani, 2005: 7-8).

Dalam penelitian ini, hubungan internasional berkaitan dengan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi yang disepakati melalui nota kesepahaman antara Indonesia dengan Arab Saudi dalam program kerjasama perdagangan antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Kementerian Perdagangan dan Investasi Kerajaan Arab Saudi. Interaksi antar aktor ini yang kemudian membuat penulis menggunakan teori-teori hubungan internasional dalam menjelaskan penelitian.

1. **Kerjasama Internasional**

Hubungan dan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada di negara lainnya. Kerjasama internasional akan menjadi sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat dimaksimalkan sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar negara satu dengan lainnya.[[2]](#footnote-2)

Sejak semula, fokus dari teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama juga dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengatisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan (Doughtery&Pfaltzgraff, 1997: 418).

Selain itu, menurut Koesnadi Kartasasmita, masih ada faktor lain yang turut mempengaruhi kerjasama internasional, yaitu adanya perbedaan ideologi, ekonomi, kebudayaan, luas daerah, kepadatan penduduk, sistem pemerintahan, dan lain-lain.[[3]](#footnote-3)

Menurut K.J. Holsti, dalam buku terjemahan M. Tahrir Azhari yang berjudul “*Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis,* Jilid II, mengemukakan bahwa kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilakan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Pesetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.[[4]](#footnote-4)

Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional, yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara.

Kerjasama internasional juga merupakan hubungan antar bangasa yang memiliki tujuan berlandaskan kepentingan nasional. Kerjasama internasional terdiri dari seperangkat aturan, prinsip-prinsip, norma-norma, dan prosedur pembuat keputusan yang mengatur jalannya rezim internasional. Selain itu, negara-negara yang melakukan kerjasama internasional mempunyai tujuan bersama atau kepentingan bersama, karena ketidakberadaan kepentingan bersama di dalam kerjasama merupakan sesuatu hal yang mustahil.[[5]](#footnote-5)

Kerjasama akan dilakukan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Oleh sebab itu keberhasilan suatu kerjasama dapat diukur dari perbandingan besarnya manfaat yang dicapai terhadap konsekuensi yang ditanggung. Masalah kerjasama terletak pada pencapaian sasaran. Tujuan akhir yang kemudian dijabarkan ke dalam sarana-sarana kerjasama ditentukan oleh persamaan kepentingan yang fundamental dari masing-masing pihak yang melakukan kerjasama (Soeprapto, 1997: 181).

Kemudian kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa:

“**Kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah komplesitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional**”[[6]](#footnote-6)

Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional:

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional, melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi, dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri.[[7]](#footnote-7)

Kerjasama internasional dapat dilakukan baik dalam hubungan multilateral, regional, maupun bilateral. Hubungan multilateral merupakan hubungan kerjasama anatara suatu negara dengan beberapa negara yang berada dalam satu kelmpok atau organisasi tertentu, contohnya OPEC dan WTO. Hubungan regional merupakan hubungan kerjasama antar negara-negara yang berada di dalam satu wilayah tertentu, contohnya ASEAN dan AFTA. Hubungan bilateral merupakan suatu konsep dalam hubungan internasional, memiliki makna yang lebih kompleks dan lebih beragam serta mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Konsep hubungan bilateral ini digunakan untuk memperkuat kerjasama antara dua negara dengan menggunakan pengaruhnya sehingga dapat mencapai tujuan nasionalnya dibidang ekonomi, politik, budaya, dan keamanan. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan definisi dan jenis kerjasma internasional diatas, kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Arab Saudi merupakan suatu kerjasama internasional yang termasuk dalam bentuk kerjasama bilateral karena kerjasama ini hanya dilakukan oleh dua negara dan bertujuan untuk mencapai serta meningkatkan tujuan nasional kedua negara tersebut.

1. **Kerjasama Bilateral**

Menurut Didi Krisna, dalam kamus politik internasionalnya mengatakan bahwa:

“**Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara**”[[8]](#footnote-8)

Kerjasama bilateral juga diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan negara tertentu. Dengan kata lain, kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dibangun oleh dua negara saja. Kerjasama bilateral tidak hanya dibangun dalam bidang ekonomi saja, tetapi kerjasama ini dibangun dalam bidang politik juga.[[9]](#footnote-9)

Menurut T. May Rudi dalam bukunya Studi Strategis yang berjudul “*Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*” mengatakan bahawa:

“**Kerjasama bilateral adalah sebuah kerjasama yang terbentuk dari berbagai komitmen individu untuk mencapai kesejahteraan secara kolektif yang merupakan hasil dari adanya persamaan kepentingan**”[[10]](#footnote-10)

Kerjasama bilateral dapat juga diartikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama. Pernyataan diatas mengandung arti bahwa hubungan bilateral adalah interaksi atau kerjasama yang dibangun oleh dua negara yang saling mempengaruhi sehingga terbentuk berbagai komitmen untuk mencapai kesejahteraan secara kolektif berdasarkan persamaan kepentingan.

Hubungan bilateral antar negara dapat meliputi sektor politik ekonomi, pertukaran duta atau diplomat hingga aktivitas seperti adanya kunjungan dalam misi kenegaraan. Konsep yang kemudian dikandung dalam interaksi ini adalah niatan untuk memperkokoh bentuk kerjasama antar negara demi tercapainya tujuan nasional. Hubungan bilateral menurut Budiono Kusumahamidjojo adalah suatu bentuk kerjasama diantara dua negara, baik yang berdekatan secara geografis maupun yang jauh dari sebrang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan kerjasama politik kebudayaan dan struktur ekonomi.[[11]](#footnote-11)

Kerjasama bilateral dapat meliputi berbagai bidang dan memiliki manfaat tersendiri, diantaranya sebagai berikut:

1. Bidang ideologi, yang perlu dilakukan yaitu saling menghormati dan tidak saling mempengaruhi. Manfaatnya yaitu untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
2. Bidang politik, yaitu saling menghormati sesuai dengan kepribadian bangsanya. Manfaatnya yaitu untuk menunjang pelaksaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan disegala bidang.
3. Bidang ekonomi, akan terjadi hubungan perdagangan ekspor dan impor. Manfaatnya yaitu untuk menunjang upaya meningkatkan pembangunan ekonomi nasional.
4. Bidang sosial budaya, dapat bekerjasama dalam mengatasi masalah pengaruh budaya. Manfaatnya yaitu untuk menunjang upaya pembinaan dan pembangunan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan kejahatan internasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
5. Bidang pertahanan keamanan, dilakukan dengan mengadakan latihan perang bersama. manfaatnya yaitu untuk menunjang upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian, keamanan, dan stabilitas internasional.[[12]](#footnote-12)

Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam kepentingan nasional.[[13]](#footnote-13)

Kepentingan nasional dapat juga dikatakan sebagai tujuan dasar dan faktor akhir penentu yang memberikan arah pada para pembuat kebijakan negara dalam merancang kebijakan luar negerinya (Perwita & Yani, 2005: 35). Kepentingan nasional menurut Morgenthau (dalam Mas’oed, 1994: 18) adalah penggunaan kekuasaan dengan cara bijaksana dalam menjaga kepentingan yang dianggap paling utama bagi kelangsungan suatu negara. Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep vital dalam studi Hubungan Internasional, karena kepentingan nasional merupakan pondasi dari perumusan kebijakan luar negeri suatu negara (Rudy, 2002: 116).

1. **Perjanjian Internasional**

Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Dalam Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.

Perjanjian tidak hanya terjadi antara individu dengan individu, melainkan antar organisasi internasional dan negarapun dapat melakukan perjanjian yang didefinisikan sebagai perjanjian internasional. Perjanjian internasional menurut Agus Suyaman SH., MH adalah:

**“kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional (negara, tahta suci, kelompok pembebasa, organisasi internasional) mengenai suatu subyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum internasional”**.

Jika menurut Konvensi Wina 1969 pasal 2 ayat 1 tentang perjanjian antara negara dan negara menjelaskan bahwa:

**“Perjanjian artinya suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya”**.

Menurut Konvensi Wina 1986 pasal 2 ayat 1 tentang perjanjian antara organisasi internasional dan negara menjelaskan bahwa:

**“Perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dirumuskan dalam bentuk tertulis antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional atau sesama organisasi internasional baik persetujuan itu berupa satu instrumen atau lebih dari satu instrumen yang saling berkaitan dan tanpa memandang apapun juga namanya”**.

Perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dan Arab Saudi melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan dan Investasi Kerajaan Arab Saudi merupakan perjanjian internasional yang tertulis atau tertuang menjadi sebuah kesepakatan dan kesepahaman untuk mencapai masing-masing kepentingan nasional dalam sektor perdagangan atau dapat dikatakan kedua negara tersebut membuat *Memorandum of Understanding* (MoU).

1. **Politik Bisnis Internasional**

Dalam tata perekonomian dunia, faktor-faktor seperti negara, pasar, kekuasaan, dan kesejahteraan merupakan hal yang paling sering dibicarakan karena tumbuhya negara modern bersamaan dengan perkembangan perekonomian internasional modern. Pada abad pertengahan (sekitar dekade 1500-an) di mana transaksi ekonomi dunia didominasi oleh negara-negara Eropa, menurut Herman Schwartz (1994: 10), negara-negara Eropa mengkombinasikan tiga aspek penting, yaitu *lawyers* (ahli hukum), *guns* (senjata), dan *money* (uang) dengan sangat efektif untuk meredam konflik-konflik kepentingan antar para raja, bangsawan, dan kaum pedagang.

Pada abad modern, walaupun struktur perekonomian dunia telah mengalami pergeseran signifikan, esensi transaksi bisnis antarnegara pada dasarnya tetap melibatkan tiga aspek penting sebagaimana terjadi pada abad pertengahan: *lawyers, guns,* dan *money*. Hanya saja saat ini peran para raja absolut telah digantinkan oleh pemimpin politik yang kekuasaan dan kewenangannya dibatasi oleh undang-undang; peran bangsawan dalam mengeksploitasi komoditas dan tenaga kerja telah digantikan oleh kaum wirausaha (*entrepreneurs*); dan kaum pedagang pengelana telah digantikan oleh MNCs (*multinational corporations*) atau PNM (perusahaan multinasional). Sejalan dengan perubahan ini, ketiga aspek perdagangan abad pertengahan, yaitu *lawyers, guns*, dan *money* sedikit banyak telah mengalami pergeseran pula. Peran *lawyers* telah digantikan oleh rezim perdagangan internasional seperti GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) dab WTO (*World Trade Oragnization*) yang pada dasarnya tetap mengatur hak dan kewajiban para pelaku transaksi bisnis internasional. Perubahan signifikan terjadi pada *guns*, dalam pengertian bahwa dewasa ini ancaman-ancaman dilakukan suatu negara tidak lagi menggunakan senjata melainkan dengan memakai isu-isu yang dapat mengundang “kutukan internasional” seperti pelanggaran HAM, perusakan lingkungan, pelanggaran hak cipta, dan sebagainya. Penggunaan *money* praktis tidak mengalami perubahan berarti hanya saja sejak berakhirnya Perang Dunia II, penetapan nilai mata uang dan pemberlakuan sistem pembayaran internasional mendapat pengawasan dari lembaga internasional, yaitu IMF (*Internastional Monetary Fund*).[[14]](#footnote-14)

Menurut Robert Gilpin (1987) dan Roger Tooze (1984) mendefinisikan politik ekonomi sebagai suatu subdisiplin yang membahas tentang interkasi antara pelbagai aktivitas politik dan ekonomi dengan menggunakan pelbagai paradigma, perspektif, teori, dan metode yang diambil dari disiplin ilmu politik dan ilmu ekonomi.[[15]](#footnote-15) Lebih lanjut lagi, menurut Robert Gilpin sebagaimana dikutip Jan Q.T.Rood bahwa “aspek politis dari ekonomi internasional berasal dari muncul dan berfungsinya negara kebangsaan (*nation-state*) sebagai dasar utama dari organisasi politik dunia masa kini.[[16]](#footnote-16)

Perdagangan internasional tidak semata-mata dikendalikan kekuatan-kekuatan ekonomi akan tetapi juga oleh faktor-faktor politik. Sebagaimana dinyatakan oleh penulis buku teks Frieden dan Lake, “ekonomi-politik internasional adalah *the study of the interplay of economics and politics in the world arena.* Dalam hal ini ekonomi didefinisikan sebagai sistem produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan, sedangkan politik sebagai sehimpunan lembaga dan aturan yang mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi.[[17]](#footnote-17)

Di dalam bisnis internasional terdapat sekurang-kurangnya tiga macam pendekatan yang umum dipakai oleh para pakar dalam menganalisis fenomena transaksi ekonomi antarbangsa di pelbagai literatur, masing-masing adalah; (1) pendekatan berorientasi kekuasaan (*power*), (2) pendekatan struktural, dan (3) pendekatan yang berorientasi pada prinsip keadilan (*justice*).

Sebagaimana dikatakan Robert Keohane (1984: 21): “Di dalam perekonomian dunia, kapan pun juga, para pelakunya menggunakan kekuasaan untuk saling memberikan pengaruh satu sama lain agar dapat mencapai tuuan masing-masing. Hal inilah yang membuat ekonomi internasional sarat dengan mutlak politik”. Secara sederhana, kekuasaan dapat dipahami sebagai kemampuan suatu pihak (individu maupun lembaga) untuk mencapai tujuan, baik dengan cara persuasi maupun pemaksaan kehendak. Di dalam bukunya, *Economy and Society* (1978 [1956]: 53), Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai: “suatu situasi di mana aktor tertentu dalam melakukan hubungan sosial cenderung melakukan kehendaknya sendiri dalam menghadapi resistensi yang datang dari pelbagai pihak”.

Ciri khas pendekatan kekuasaan adalah penekanan pada negara sebagai unit alanisis yang paling utama. Bagi penganut teori ini antara lain Charles Kindleberger dan Stephen Krasner, menyatakan bahwa negara merupakan aktor sentral karena kedudukannya yang otonom sebagai *severeign entrepreneurs* (investor yang berdaulat).

Ada dua hal yang mendorong negara dalam mendominasi kegiatan politik ekonomi. Pertama, kecenderungan negara untuk selalu “mengungguli” pelbagai kekuatan masyarakat dan membendung pelbagai tekanan yang datang dari kelompok maupun organisasi di luar negara. Kedua, negara dianggap mampu untuk memkasakan kehendaknya kepada rakyat bilamana perlu.[[18]](#footnote-18)

1. **Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara, karena saling bersaing di dalam pasar internasional. Salah satu keuntungan perdagangan internasional adalah memungkinkan suatu negara untuk berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa yang murah. Disamping itu, manfaat nyata dari perdagangan internasional dapat berupa kenaikan pendapatan negara, cadangan devisa, transaksi modal dan luasnya kesempatan kerja.[[19]](#footnote-19)

Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun subyek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan (Sobri, 2000).

Perdagangan internasional merupakan suatu aspek yang penting dalam melakukan suatu kerjasama ekonomi internasional. Mengenai pentingnya perdagangan internasional, **Panglaykim** memberikan penjelasan tentang pentingnya perdagangan internasional bahwa:

“**Aktivitas kerjasama ekonomi internasional itu sendiri meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilaksanakan antara negara maupun individu dari suatu negara dengan negara-negara lainnya. Dua aspek penting adalah perdagangan dan investasi**”[[20]](#footnote-20)

Transaksi ekspor-impor adalah transaksi perdagangan internasional yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara yang berbeda (Roselyne Hutabarat, 1991: 1).

Transaksi ekspor yang dilakukan Indonesia sebagai eksportir komoditi otomotif yaitu mobil toyota ke Arab Saudi merupakan kelompok *Confirming House*. Banyak perusahaan asing mendirikan kantor cabangnya atau bekerjasama dengan warga setempat mendirikan anak perusahaan (*sister company*) atau *subsidiary company* di dalam negeri. Kantor cabang atau anak perusahaan yang semacam ini bekerja atas perintah dan untuk kepentingan kantor induknya atau untuk kepentingan konsumen di negara asalnya dengan memperoleh komisi ataupun keuntungan. Badan usaha semcam ini disebut dengan *Confirming House*, atau *Export Commision House* ataupun *Export Indent House*. Kantor cabang atau anak perusahaan asing yang bekerja semacam ini biasanya melakukan usaha pengumpulan sortasi, *upgrading*, dan pengepakan ekspor (*export-packing*) dari komoditi lokal. Bila komoditi atau telah siap ekspor (*ready for export*) maka kantor cabang atau anak perusahaan itupun bertindak sebagai eksportir. Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa *confirming house* ini adalah perusahaan lokal (setempat) yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan dan hukum setempat tapi bekerja untuk dan atas perintah kantor induknya yang berada diluar negeri.[[21]](#footnote-21)

Kegiatan ekspor impor merupakan jual beli yang dilakukan secara internasional, artinya dilakukan antar negera. Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, jual beli merupakan suatu perbuatan hukum antara pihak penjual di satu pihak dengan pihak pembeli di lain pihak mengenai suatu barang. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuk yang sederhana, yaitu barter, jual beli barang atau komoditi, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks (Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001: 9).

Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi (Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001: 10).

Perdagangan atau pertukaran dapat diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung rugi dari pertukaran tersebut, dari sudut kepentingan masing-masing dan kemudian menentukan apakah ia mau melakukan pertukaran atau tidak (Boediono, 2000).

Pada intinya, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Menurut Sadono Sukirno, perdagangan internasional memiliki banyak manfaat, diantaranya (Amir M.S., 2002: 14):

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri.

Banyak fator yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memnuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.

1. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi.

Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoeh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi, walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

1. Memperluas pasar dan menambah keuntungan

Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunya harga produksi mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri.

1. Transfer teknologi modern

Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.[[22]](#footnote-22)

 Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya perdagangan internasional yang tidak lagi mengenal batas-batas negaranya, maka kegiatan perekonomian antar negara dengan cepat merambah ke negara-negara lain. Para investor dengan bebas dapat menentukan negara tempat tujuan investasinya. Para produsen juga dengan mudah menentukan negara yang dijadikan pasar sasarannya. Bahkan, negara-negara yang sedang berkembang dapat dengan mudah mendapatkan negara yang bersedia menjadi pendonor dana bagi pembangunannya. Dari uraian tersebut maka penulis mencoba membuat sebuah asumsi sebagai berikut:

1. Kebutuhan barang yang semakin meningkat, tingginya permintaan pasar, dan keberagaman jenis permintaan sehingga suatu negara tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri karena tidak memungkinkannya Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga memicu terjadinya kerjasama ekonomi yang bertujan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan nasional masing-masing negara.
2. Dalam perkembangannya hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Arab Saudi terkadang mengalami peningkatan dan penurunan. Menurut Badan Pusat Statistik yang diolah Kementerian Perdagangan, total ekspor non migas antara Indonesia dengan Arab Saudi dari tahun 2013-2017 mengalami surplus karena impor non migas Indonesia dari Arab Saudi lebih kecil dari nilai ekspor.
3. Perihal kendala dan tantangan ekspor produk mobil Indonesia ke Arab Saudi, untuk saat ini produk ekspor mobil Indonesia belum menemukan kendala berarti yang dapat menghambat peningkatan total nilai ekspor produk mobil ke Arab Saudi, sedangkan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia adalah adanya kebijakan terkait standar efisiensi bahan bakar, emisi dan keamanan (*safety*) mobil, tetapi hal tersebut tidak berdampak secara signifikan terhadap total nilai ekspor produk mobil Indonesia ke Arab Saudi.
4. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah dijabarkan, penulis menarik sebuah hipotesis, yaitu:

“**Kerjasama yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan ekspor mobil Toyota Indonesia ke Arab Saudi yaitu melalui kesepakatan dan kesepahaman maka ekspor Toyota Indonesia meningkat menjadi 130.000 unit per tahun**”.

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hipotesis(Teoritik) | Indikator(Empirik) | Verifikasi(Analisis) |
| Variabel Bebas:Kerjasama Indonesia Dalam Meningkatkan Ekspor Toyota Indonesia ke Arab Saudi | 1. Adanya kerjasama bilateral di bidang perdagangan.
2. Menghasilakan sebuah MoU antara Indonesia dengan Arab Saudi.
3. Pembaharuan MoU oleh kedua negara.
 | 1. Program kerjasama di bidang perdagangan yang dilakukan antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Kementerian Perdagangan dan Investasi Kerajaan Arab Saudi.
2. MoU yang dilakukan kedua negara tersebut menghasilkan kerjasama dalam mendorong perdagangan pelbagai barang dan hasil produksi antara kedua negara untuk memperluas dan meningkatkan hubungan perdagangan salah satunya dibidang otomotif.
3. Persetujuan kerjasama ekonomi dan teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, ditandatangani antara kedua negara pada 1401 Hijriah (1981) dan diperbaharui pada tanggal 1 Maret 2017.

 (Sumber: <http://treaty.kemlu.go.id>) |
| Variabel Terikat:Maka Ekspor Toyota Indonesia Meningkat Menjadi 130.000 Unit per tahun | 1. Adanya peningkatan ekspor non-migas ke Arab Saudi dari 2010-2014.
2. Adanya misi Kementerian Perdagangann Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan.
3. Adanya peningkatan jumlah ekspor mobil ke Arab Saudi dari 2014 hingga 2017
 | 1. Peningkatan tersebut menandakan bahwa hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi terbilang cukup baik.
2. Dari misi tersebut tercipta tujuan dari Kementerian Perdagangan Indonesia yaitu, peningkatan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa serta menjadikan Arab Saudi tujuan ekspor utama komoditi barang yang bernilai tambah salah satunya adalah otomotif

(Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2014-2019).1. Peningkatan jumlah ekspor mobil ke Arab Saudi mengalami peningkatan. Di tahun 2014 melakukan ekspor sebesar 160.000 unit meningkat 42.000 unit dari tahun sebelumnya. Tahun 2015 sebesar 177.000 unit. Tetapi di tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 169.000 unit dan terjadi peningkatan 10% di tahun 2017 dari tahun sebelumnya.

(Sumber: [https://kumparan.com/@kumparanoto/cerita-dan-prestasi-ekspor-mobil-toyota-buatan-indonesia](https://kumparan.com/%40kumparanoto/cerita-dan-prestasi-ekspor-mobil-toyota-buatan-indonesia)) |

**Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

Sumber: Diolah oleh peneliti

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**Solusi Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Untuk Mengatasi Kendala Ekspor ke Arab Saudi**

**Perkembangan Kerjasama Perdagangan**

**Kontribusi Ekspor Toyota Indonesia ke Arab Saudi**

**Program Kerjasama Di Bidang Perdagangan**

**Ekspor Mobil Toyota Indonesia Ke Arab Saudi**

**ARAB SAUDI**

**INDONESIA**

**Perdagangan Internasional**

**Kerjasama Internasional**

**Tabel 1.2 Kerangka Teoritis**

1. Alfi Fauziah “*Kerjasama Ekonomi Indonesia-Jepang Dalam Bidang Ekspor Non-Migas Indonesia Ke Jepang Pada Komoditas Pertanian Periode 2011-2015*” (Bandung: Universitas Pasundan, 2016), 12. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zulkifli, Tesis: “*Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia)*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2012), 18 [↑](#footnote-ref-2)
3. Koesnadi Kartasasmita, *Administrasi Internasional* (Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, 1997), 22-27 [↑](#footnote-ref-3)
4. K.J. Holsti, “*Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis,* Jilid II”, Terjemahan M. Tahrir Azhari. (Jakarta: Erlangga, 1988), 652-653 [↑](#footnote-ref-4)
5. Starlet Rallysa Injaya, Skripsi: “*Kerjasama Internasional Indonesia dan Jepang: Peran Jepang Terhadap Isu Deforestasi di Indonesia Dalam Skema Asia Forest Partnership (AFP) Periode 2008-2011*” (Jakarta, UIN Jakarta, 2013), 9 [↑](#footnote-ref-5)
6. Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi dan Administrasi Internasional* (Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, 1997), 19 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ratu Rayanti Arumsari, Skripsi: “*Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerjaaan Arab Saudi Mengenai Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pasca di Berlakukan Moratorium TKI Sektor Informal Tahun 2011*” (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2014), 30 [↑](#footnote-ref-7)
8. Didi Krisna, *Kamus Politik Internasional* (Jakarta: Grasindo, 1993), 18 [↑](#footnote-ref-8)
9. Sari Dwita Utama, Skripsi: “*Politik Luar Negeri Indonesia Selama Konfrontasi Dengan Malaysia*” (Lampung: Universitas Lampung, 2012), 16 [↑](#footnote-ref-9)
10. Indra Hernawan, Skripsi: “*Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura Dalam Pengembangan Special Economic Zone Di Wilayah Batam Bintan Dan Karimun Setelah Diberlakukan Asean Economic Community Tahun 2006-2017*” (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2018), 27 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid [↑](#footnote-ref-11)
12. Faiz Resha Majid, Skripsi: “*Dinamika Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Di Arab Saudi*” (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), 16 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid., 17 [↑](#footnote-ref-13)
14. Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 33-35. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid, 27 [↑](#footnote-ref-15)
16. Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 28. [↑](#footnote-ref-16)
17. Mochtar Mas’oed, *Ekonomi-Politik Internasional dalam Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hlm.3 [↑](#footnote-ref-17)
18. Hadiwinata, Op.Cit., 45-46. [↑](#footnote-ref-18)
19. Mikhral Rinaldi, Abd. Jamal, Chenny Seftarita, “*Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional Dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*”. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia. Volume 4, 1 Mei 2017, 50 [↑](#footnote-ref-19)
20. Emy Sri Reskiyah, Skripsi Strata Satu: “*Peranan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komperehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU CEPA) Dalam Peningkatan Kerjasama Perdagangan Indonesia-Perancis*” (Bandung: Universitas Pasundan, 2017), 14 [↑](#footnote-ref-20)
21. Yusron Karta Muslihin, Skripsi: “*Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Hubungan Perdagangan Indonesia-Ethiopia di Sektor Non-Migas 2009-2013*” (Bandung, Universitas Komputer Indonesia, 2014), 40-41. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ari Wigiarti, Skripsi: “*Kerjasama Indonesia-Jepang Pada Industri Otomotif Mobil Jepang di Indonesia Melalui Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*” (Bandung, Universitas Komputer Indonesia, 2014), 37-38 [↑](#footnote-ref-22)